

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT KOMISI IX DPR RI

(Bidang: Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial)

Tahun Sidang

: 2025-2026

Masa Persidangan

· 1

Rapat ke

: 12 (dua belas)

Jenis Rapat

: Rapat Kerja

Dengan

: Menteri Ketenagakerjaan RI dan Menteri Pelidungan

Pekerja Migran Indonesia/BP2MI

Sifat Rapat

: Terbuka

Hari/tanggal

: Senin, 15 September 2025

Waktu

: Pukul 17.00 WIB s.d. selesai

Tempat

: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Acara

: Penyempurnaan dan Penetapan RKA K/L sesuai hasil

Badan Anggaran DPR RI

Ketua Rapat

: Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A./Wakil Ketua Komisi IX

DPR RI

Sekretaris Rapat

: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat

Komisi IX DPR RI

Hadir

: A. Anggota DPR RI

36 Dari jumlah 43 Anggota Komisi IX DPR RI

B. Pemerintah

- Menteri Ketenagakerjaan RI; Prof. Yassierli,

Ph.D. beserta jajaran.

- Menteri Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia/BP2MI; Drs. Mukhtarudin beserta

jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI dan Menteri Pelidungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI dibuka pukul 17.00 WIB setelah memenuhi kuorum sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

- 1. Komisi IX DPR RI menyetujui Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp546.336.168.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp476.550.001.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Seribu Rupiah) dan Program Penempatan, Pelindungan dan Pemberdayaan PMI sebesar Rp69.786.167.000,00 (Enam Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp394.256.578.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp4.100.000.000,00 (Empat Miliar Seratus Juta Rupiah);
 - c. Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN) sebesar Rp5.650.000.000,00 (Lima Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - d. Direktorat Jenderal Penempatan sebesar Rp22.720.000.000,00 (Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);
 - e. Direktorat Jenderal Pelindungan sebesar Rp7.044.450.000,00 (Tujuh Miliar Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - f. Direktorat Jenderal Pemberdayaan sebesar Rp6.350.000.000,00
 (Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan

- g. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) sebesar Rp106.215.140.000,00 (Seratus Enam Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
- 2. Komisi IX DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp3.716.857.021.000,00 (Tiga Triliun Tujuh Ratus Enam Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp1.124.751.498.000,00 (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk Belanja Operasional Pegawai dan Belanja Operasional Barang dan Belanja Non-Operasional program prioritas penguatan tenaga kerja sebesar Rp2.592.105.523.000,00 (Dua Triliun Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Seratus Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian untuk:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp452.023.503.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Dua Miliar Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah);
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp42.415.338.000,00 (Empat Puluh Dua Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - c. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) sebesar Rp275.098.822.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - d. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsos TK) sebesar Rp1.320.696.116.000,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah);
 - e. Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebesar Rp205.118.156.000,00 (Dua Ratus Lima Miliar Seratus Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

- f. Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) sebesar Rp138.135.641.000,00 (Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), dan
- g. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) sebesar Rp1.283.369.445.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.